

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 27 Medan

Muhammad Iqbal¹, Siti Nur Aisah Solin², Hafiza Tasya Harahap³, Hasmar Sulaiman⁴

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
iqbalmpi08@gmail.com

Abstract

Inclusive education is to provide education system that provides opportunities for all learners with special needs to be able to follow education or learning in an educational setting together with the learners in general (East Java Governor Regulation, No. 6 of 2011). In the implementation of policy implementation implementation of inclusive education in six schools Organising Inclusive Level Elementary School and Junior High School, was found several classical problems, namely a lack of teachers Educators Lodging, unavailability of dedicated space for the handling of Children with Special Needs, no psychologists or guidance counseling, lack of socialization on inclusive education in the community around the school, and lack of knowledge about of Children with Special Needs regular teachers. The purpose of this study was to describe the implementation of the Government policy of inclusive education at the level of elementary and junior high school levels. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The focus of research on the implementation or operation of the implementation of inclusive education by using the theory Merile S. Grindle, while the data collection used observation, interview, documentation and triangulation.

Keywords: Policy Implementation, Education Policy

Abstrak

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Pergub Jatim, Nomor 6 Tahun 2011). Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di enam Sekolah Penyelenggara Inklusif jenjang SDN dan SMPN, ditemukan beberapa masalah klasik yaitu kurangnya tenaga guru Pendidik Khusus (GPK), tidak tersedianya ruang khusus untuk penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), tidak ada tenaga psikolog atau Bimbingan Konseling (BK), kurangnya sosialisasi tentang pendidikan inklusif di masyarakat sekitar sekolah, dan kurangnya pengetahuan guru reguler tentang ABK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Pemerintah tentang pendidikan inklusif di jenjang Sekolah Dasar dan jenjang Sekolah Menengah Pertama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian pada pelaksanaan atau implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan menggunakan teori Merile S. Grindle, sedangkan pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari variabel isi kebijakan dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 telah memenuhi semua kepentingan peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus. Adanya program penyelenggaraan Pendidikan Inklusif manfaatnya dirasakan oleh semua orang tua anak berkebutuhan khusus, target perubahan dari Peraturan Gubernur Jawa Timur perlu ditingkatkan terutama pada segi implementor kebijakan, sumber daya manusia untuk Tenaga Guru Pendidik Khusus, tenaga Bimbingan Konseling (BK), dan tenaga terapis yang belum belum dialokasikan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pendidikan

Copyright (c) 2023 Muhammad Iqbal, Siti Nur Aisah Solin, Hafiza Tasya Harahap, Hasmar Sulaiman

Corresponding author: Muhammad Iqbal

Email Address: iqbalmpi08@gmail.com (Jl. William Iskandar Ps. V, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumut)

Received 07 February 2023, Accepted 14 February 2023, Published 14 February 2023

PENDAHULUAN

Permasalahan pendidikan di Indonesia tampaknya perlu mendapat perhatian yang sangat serius. Masalah-masalah di lapangan terkait dengan hal ini masih sering kita jumpai ibarat jamur di

musim hujan, tubuh berkembang silih berganti secara simultan; dari pemberantasan buta-huruf, putus sekolah, kenakalan remaja, Gepeng, sampai pada peluang untuk mendapat kesempatan dalam pendidikan (terutama untuk para penyandang disabilitas), dan lain-lain.

Pendidikan bagi peserta penyandang disabilitas di Indonesia telah diwadahi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas ini disediakan dalam tiga jenis lembaga pendidikan, yakni: Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai lembaga pendidikan yang tertua, menampung peserta didik yang jenis kelainannya sama. Contohnya: SLB Tunarungu, SLB Tunagrahita, SLB Tunanetra, SLB Tunadaksa, SLB Tunalaras, dan sebagainya. SDLB menampung berbagai jenis anak yang berkelainan menjadi satu, sehingga dalam satu sekolah atau bahkan satu kelas terdiri dari berbagai macam peserta didik yang berkelainan, misalnya tunarungu, tunadaksa, tunanetra, tunalaras, tunagrahita, dan sebagainya. Adapun Pendidikan terpadu adalah sekolah regular yang menampung anak berkelainan dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajarnya sama. Namun jenis ini biasanya hanya masih menampung anak tunanetra saja, itu pun terkadang masih banyak sekolah yang keberatan untuk menampungnya.

Dalam perkembangannya kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yang memberikan warna baru dalam penyediaan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas ini. Dalam penjelasannya, pasal 15 dan pasal 32 menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Aturan terbaru yang mengatur tentang pendidikan inklusif ini, adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 70 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Hal ini tentunya merupakan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas dengan bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif.

Pendidikan inklusi relatif banyak dibuka oleh berbagai lembaga pendidikan di Indonesia, karena semangat pendidikan inklusi memang sangat sesuai dengan filosofi Bangsa yang menyatakan Bhineka Tunggal Ika. Selain lembaga-lembaga pendidikan resmi Pemerintah (negeri), ternyata tidak sedikit lembaga swadaya atau swasta yang menyediakan ruang bagi pendidikan inklusi di lembaganya. Namun demikian bila dibanding dengan angka anak berkebutuhan khusus, maka jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan ruang untuk pendidikan inklusi belumlah memadai. Data

tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendibud, Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi berjumlah 814 sekolah dengan jumlah siswa mencapai 15.181 siswa (dikutip dari Solider).

METODE

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif dengan metode Deskriptif. Penelitian kualitatif lebih memberikan tekanan kepada pemahaman dan makna, berkaitan erat dengan nilai-nilai tertentu, lebih menekankan pada proses daripada pengukuran, mendeskripsikan, menafsirkan, dan memberikan makna dan tidak cukup dengan penjelasan belaka, dan memanfaatkan multi metode dalam penelitian (Sutama, 2012:61). Desain penelitian ini penelitian etnografi. Penelitian etnografi menekankan pada budaya dan kekhususan orang-orang di dalamnya, yaitu apa yang menjadi karakteristik dasar sebuah kelompok dan apa yang membedakan mereka dalam kelompok lain yang mengandalkan keterlibatan peneliti dalam komunitas atau kelompok selama jangka waktu tertentu dilapangan (Tohirin, 2012:35) Data yang diambil melalui wawancara, dan observasi. Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui Analisis kebijakan pendidikan inklusi di SMP Negeri 27 Medan. Penelitian ini menggunakan Wawancara dan Observasi sebagai media pengumpulan data.

HASIL DAN DISKUSI

Dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP N 27 MEDAN, terdapat 5 komponen yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu implementasi. Komponen tersebut terdiri dari Struktur Birokrasi, Komunikasi, Sumberdaya, Lingkungan Kebijakan, dan Karakteristik Masalah. Struktur Birokrasi merupakan elemen yang penting dalam suatu implementasi kebijakan. Edwards III (Subarsono, 2005:90-92), struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2005: 94), terdapat tiga kelompok yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Salah satu komponen tersebut adalah karakteristik masalah. Dalam penelitian ini, komponen karakteristik masalah terdiri dari indikator masalah dan kendala. Dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta, terdapat masalah dan kendala yang dihadapi sekolah. Kendala yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, Guru Pendamping Kelas (GPK), dan Orang tua murid. Sedangkan untuk masalah terdiri dari beberapa aspek, yang diantaranya adalah sarana prasarana, bahan ajar/buku, kurikulum, sistem pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi.

Faktor pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP N 27 MEDAN terdiri dari adanya dukungan warga sekolah dan berbagai pihak di luar sekolah. Dukungan dari warga

sekolah dapat dilihat dari sekolah mendukung dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selain itu, di sebagian besar sekolah juga telah memiliki program kerja atau rencana kegiatan tertulis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selain dukungan dari warga sekolah, masih terdapat dukungan atau bantuan yang diberikan dari berbagai pihak, seperti orang tua murid, masyarakat, komite sekolah, Dinas Pendidikan Kota, dan Dinas Pendidikan Provinsi. Faktor penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP N 27 MEDAN adalah Pemahaman dan Sikap Kepala Sekolah, Guru, dan Orang tua murid di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang belum optimal. Hal tersebut terjadi karena belum semuanya memahami mengenai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Selain itu, ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang kurang mencukupi dikarenakan masih terdapat sekolah yang belum mempunyai GPK. Selanjutnya, belum tersedianya sarana dan prasarana atau media khusus bagi ABK secara memadai dikarenakan oleh masalah biaya, belum tersedianya bahan ajar/buku yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak, modifikasi kurikulum dan sistem pembelajaran yang belum dilaksanakan dengan baik di sebagian besar sekolah, dan belum adanya peraturan baku mengenai pelaksanaan evaluasi yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif terdiri dari dukungan dari pihak sekolah dan pihak luar sekolah. Dalam hal ini, sebagian besar sekolah telah memiliki program kerja atau rencana kegiatan tertulis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Melalui program tersebut, faktor pendukung yang ada dapat dimanfaatkan sekolah sebagai pedoman atau acuan yang digunakan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selanjutnya, pihak luar sekolah juga telah mendukung dengan memberikan bentuk perhatian, kerjasama, motivasi, bantuan dana, pendampingan, dan sosialisasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa faktor pendukung tersebut dapat memberikan manfaat kepada sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, pemanfaatan faktor pendukung yang ada dapat dijadikan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai dengan kebijakan yang telah diatur dan sebagai bahan perbaikan untuk selanjutnya. Dilihat dari faktor penghambat dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif, masih ditemukan bahwa pemahaman dan sikap Kepala Sekolah, Guru, dan Orang tua murid yang belum optimal.

Dari faktor tersebut, solusi yang dilakukan sekolah adalah dengan mengadakan rapat secara berkala untuk memberikan pemahaman mengenai pendidikan inklusif. Selain itu, sekolah juga memberikan pendampingan kepada orang tua yang dijadikan solusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai pendidikan inklusif. Selanjutnya, faktor penghambat yang lain adalah ketersediaan Guru Pendamping Khusus yang kurang mencukupi. Solusi sekolah dalam menghadapi faktor penghambat tersebut adalah dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada sebagian besar guru, sehingga guru kelas dapat memahami cara menghadapi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kategorinya. Selain itu, terdapat orang tua yang mencari Guru Pendamping Khusus bagi anaknya untuk membantu sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Faktor penghambat selanjutnya adalah karena adanya masalah sarana dan prasarana, bahan ajar/buku, modifikasi kurikulum dan sistem pembelajaran, serta pelaksanaan evaluasi yang belum dilaksanakan secara optimal. Solusi dari faktor penghambat tersebut adalah dengan adanya bantuan dana yang diberikan dari Dinas Pendidikan setempat dan sosialisasi mengenai modifikasi kurikulum, sistem pembelajaran, dan evaluasi. Dari beberapa solusi yang telah dijelaskan diatas, dapat dimaknai bahwa sekolah telah serius dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif yang dibuktikan dengan terus mengalami perbaikan terhadap penghambat yang ada di sekolah.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP N 27 MEDAN terdiri dari 5 komponen yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu: (1) Struktur Birokrasi (2) Komunikasi, (3) Sumberdaya (4) Lingkungan Kebijakan (5) Karakteristik Masalah Aspek kendala berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti Kepala Sekolah, Guru, GPK, dan Orang tua murid.

Faktor pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif diantaranya adalah dukungan dari warga sekolah dan pihak luar sekolah dalam menyelenggarakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sebagian besar sekolah memiliki program kerja atau rencana kegiatan tertulis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pihak luar sekolah memberikan dukungan kepada sekolah dengan bentuk perhatian, kerjasama, motivasi, finansial, dan sosialisasi. Faktor penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif diantaranya adalah pemahaman serta sikap Kepala Sekolah, Guru, dan Orang tua murid mengenai ABK yang belum optimal, ketersediaan GPK yang kurang mencukupi, sarana prasarana dan bahan ajar/buku belum tersedia secara memadai, modifikasi

Kurikulum system pembelajaran, dan evaluasi yang belum optimal. Pemanfaatan faktor pendukung yang ada di sekolah dijadikan untuk membantu kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Sedangkan solusi dari faktor penghambat yaitu dengan adanya rapat, sosialisasi, pelatihan, dan bantuan dari Dinas Pendidikan yang dapat memberikan perbaikan sekolah untuk selanjutnya.

REFERENSI

- Mohammad Takdir Ilahi. 2013. Pendidikan Inklusi: Konsep & Aplikasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mudjito. AK, Harizal, Elfindri. 2012. Pendidikan Inklusif: Tuntunan untuk Guru, Siswa dan Orang Tua anak berkebutuhan Khusus dan layanan Khusus. Jakarta: Baduose Media.
- Solichin Abdul Wahab. 2011. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM press.
- Mohammad Takdir Ilahi. 2013. Pendidikan Inklusi: Konsep & Aplikasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz
- Suyanto & Mudjito. AK. 2012. Masa Depan Pendidikan Inklusif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar

- Siregar, L. Y. S. (2017). Full Day School Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter (Perspektif Psikologi Pendidikan Islam). Diakses pada 12 Oktober 2017, dari ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fikrotuna/article/download/2945/2152/SMA
- Sumayyah, D. R. D. (2016). Persepsi terhadap Full Day School dengan Regulasi Diri pada Siswa SMP Islam Hidayatullah Semarang. *Jurnal Empati*, 5(1), 144-147
- Solichin Abdul Wahab. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*”, (Malang: UMM Press. 2008), h. 70
- Seftiana. (2017). Analisis Penerapan Kebijakan Full Day School terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X di MAN 1 Surakarta. Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
- Suwarto, S. (2017). *Mengembangkan tes ilmu pengetahuan alam terkomputerisasi*. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*.